

## REFERENSI

### a. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2005 Tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Undang-Undang No.43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*).

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal fishing*).

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

PP No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara

Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/ PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.50/Kepmen-KP/2017 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

**b. Buku**

Chapsos, L. (2017). Maritime Security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda? In Marine Policy.

Dr.Chomariyah. (2014). *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan*.

Mochamad Yani, Y. . (2017). *Pengantar Studi Keamanan*.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*

Tribawono, D. (2013). *Hukum Perikanan Indonesia*.

### C. Journal dan Artikel Ilmiah

Agustina, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. *Jurnal Reformasi Hukum*, 1(2).

Aryo, M. A. (2020). Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Ekonomi. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(2).

Fauzan. (2019). Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing. *Journal Internasional Relations*, 3(2).

Imanuela Siahaya, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Menurut UNCLOS 1982. *Lex Crimen*, 10(5).

Junef, M. (2019). Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(3).

Karim, M. (2020). Evaluasi Dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014-2018. *Jurnal Akuatika Indonesia*, 5(1)

Kurnia Wardana, N. (2020). Pengerahan kekuatan laut dalam menghadapi ancaman di laut natuna utara. *Jurnal Keamanan Maritim*, 6(2).

Kusumawardhana, I. (2020). Garuda in Southeast Asia's Contested Waters: Indonesia dan Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara. *Indonesian*

*Perspective*, 5(1).

Merida Hutagalung, S. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1).

Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2).

Mochamad yani, yanyan. (2015). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. *Jurnal Pertahanan*, 5(2).

Reza Putra, A. (2017). Partisipasi Indonesia Dalam Diplomasi Pertahanan Untuk Keamanan Maritim Di Asia Tenggara ( Studi Tentang Regional Cooperation Agreement On Combating Piracy AND Armed Robbery Against In Asia). *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 3(2).

Salsabila, A. P. (2018). Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia. *Lex Scientia Review*, 2(1).

Sugianto, A. (2021). Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya pada Aspek Pertahanan Keamanan. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indoneisa*, 9(2).